

INDONESIA DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN KEAMANAN DAN PERDAMAIAN GLOBAL MENJELANG ABAD KE-21

Syarwan Hamid

Keamanan dan perdamaian dunia yang abadi adalah dambaan setiap bangsa. Namun kita sadari bahwa keadaan itu sulit diupayakan. Konflik antar bangsa yang disebabkan oleh berbagai faktor perbedaan kepentingan, senantiasa muncul di berbagai belahan dunia.

*Berdasarkan pelajaran yang kita dapatkan dari sejarah, mungkin ada benarnya ungkapan kuno *cie peace pacem para bellum*, bahwa di masa damai bersiap-siaplah untuk berperang, dan inter bellum et pacum nihil medium, yakni antara perang dan damai itu tidak terdapat masa antara. Ungkapan ini akan menjadi lebih bermakna bila dikaitkan dengan perkiraan bahwa perang yang akan datang memiliki konotasi yang luas. Bukan saja perang dalam arti militer, tetapi juga politik, ekonomi, budaya, psikologi dan lain-lain, sehingga siklus perdamaian dan perang senantiasa berulang. Pada satu saat, keadaan damai relatif terjadi, namun bila dimunculkan faktor pemicu akan lahir perang yang baru, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menghadapi abad ke-21, perkembangan serta perubahan cepat yang terjadi perlu diamati untuk melihat kemungkinan hakekat ancaman terhadap perdamaian global sesuai dengan kemajuan zaman.*

Gelagat Perkembangan Situasi Global

Dunia telah berubah dengan cepat. Sejalan dengan proses perubahan itu, manusia tetap menghadapi berbagai suasana ketidakpuasan. Arus informasi yang melanda ke seluruh penjuru dunia, akan semakin luas dampaknya di masa mendatang, sehingga akan berpengaruh terhadap peranan Indo-

nesia.

Ketergantungan dan keterkaitan antar aspek kehidupan akan semakin terasa, disertai tuntutan kemampuan daya saing yang semakin tinggi, menyebabkan ikatan antar negara semakin menguat. Perkembangan ilmu

Penulis Let. Jen. TNI Kepala Staf Sosial Politik
Angkatan Bersenjata RI.

pengetahuan dan teknologi komunikasi serta informasi memacu keterkaitan tersebut sehingga membawa pengaruh yang sangat besar ke seluruh lapisan masyarakat dunia baik yang positif maupun negatif.

Secara umum tantangan masa depan akan tetap berdimensi internal dan eksternal. Tantangan internal pada tiap negara secara khusus adalah kesenjangan sosial serta kesenjangan antara aspirasi, kemampuan dan kesempatan yang semakin melebar serta menguatnya tuntutan masyarakat sebagai konsekuensi dari kemajuan pembangunan di negara yang bersangkutan. Secara eksternal, tantangan yang semakin menguat adalah isu global, yakni masalah hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup, penetrasi budaya asing, transformasi informasi dan teknologi.

Untuk itu, diperlukan kemampuan memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga dapat menyiapkan langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan. Agar lebih jelas, perlu menelaahnya dari berbagai aspek, sebagai berikut:

Pertama, aspek politik. Suatu fenomena yang tidak bisa dielakkan dan berpengaruh pada pembangunan nasional di masa depan adalah semakin menguatnya hegemoni politik negara-negara maju terhadap negara berkembang yang ditunjang oleh kemampuan ekonomi dan kekuatan militer. Perbedaan yang tajam dalam persepsi dan penerapan konsepsi HAM, telah mengakibatkan ketidakserasian

dalam pola hubungan antar negara. Masalah HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup bagi negara maju telah dijadikan isu sentral yang digunakan sebagai pembenaran untuk ikut campur tangan terhadap masalah dalam negeri bangsa lain.

Kedua, aspek ekonomi. Globalisasi ekonomi berjalan semakin cepat dan berdampak luas. Faktor ketergantungan antar negara menjadi sangat besar. Dalam konteks ini, perusahaan multi nasional memiliki persepsi bahwa pembatasan investasi dan modal antarnegara menjadi tidak relevan. Konsepsi tentang keamanan akan lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melindungi kepentingan ekonomi, berbagai upaya seperti proteksionisme, pembatasan kuota, isu ekolabeling, dan standardisasi mutu, terus dikembangkan oleh negara-negara maju yang pada gilirannya dapat menyulitkan negara-negara berkembang.

Negara maju terus mendesak agar segera tergelar pasar bebas, sebagai model tata ekonomi dunia baru. Hal ini menjadi tantangan berat bagi negara-negara berkembang. Menurut konsepsi tersebut, perkembangan ekonomi dunia menunjukkan kecenderungan akan berpusat pada negara-negara industri maju, sehingga sukar dihindari Indonesia untuk tidak masuk dalam APEC, AFTA dan WTO berikut segala resikonya.

Di sisi lain berkembangnya *porto-*

folio capital yang berasal dari akumulasi dana pensiun, asuransi dan dana-dana segar lainnya yang relatif cukup besar telah masuk ke negara-negara berkembang, melalui pembelian saham yang diminati, sehingga menambah dana investasi dan menambah uang beredar. Negara-negara yang memiliki penduduk besar akan menjadi ajang persiapan negara maju untuk mencari pangsa pasar bagi komoditi tertentu dan Indonesia masuk sebagai salah satu sasaran *marketing* mereka.

Ketiga, aspek sosial-budaya. Perubahan corak kehidupan masyarakat yang sangat cepat, diikuti dengan perubahan karakter sosial, menjadikan manusia di dunia cenderung agresif, proaktif, inovatif dan bahkan selalu mencari peluang untuk mencapai peningkatan taraf hidup. Hal itu didorong oleh kemajuan kecerdasan, kesehatan dan gizi yang membaik, disertai kreativitas untuk saling bersaing dan berpacu. Interaksi sosial budaya antarmanusia dan antarbangsa telah mengubah sikap hidup serta cara pandang terhadap masalah-masalah sosial.

Perbedaan dan persamaan cara pandang itu membawa dampak negatif dan positif. Namun kesadaran dan keluasan berpikir serta kemampuan beradaptasi bagi masyarakat akan dapat mempercepat proses sosial menuju kemajuan yang positif. Kemampuan masyarakat untuk menerima, menyaring dan memilih budaya asing yang cocok bagi bangsanya, akan kembali

bersumber pada jati diri sebenarnya, setelah merasakan keunggulan dan kelemahan budaya asing. Sisi negatif yang menonjol adalah bahwa dengan pencampuran budaya, akan dihasilkan bentuk budaya baru yang sama sekali terlepas dari budaya bangsanya, sehingga cenderung menuju pada keterasingan budaya. Pada muaranya akan melahirkan generasi baru yang tidak memiliki jati diri. Itulah sebagian prediksi kekhawatiran yang muncul di era mendatang, terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki akar budaya yang kuat.

Kemajuan pesat Iptek telah mendorong sikap hidup masyarakat menjadi dinamis, memiliki mobilitas tinggi dan cepat tanggap, serta tidak luput dari sikap konsumtif, individualistik dan eksklusif. Masyarakat informasi adalah suatu wujud tatanan kehidupan masyarakat yang telah secara optimal memanfaatkan informasi sebagai peluang bagi semua kepentingan. Oleh karena itu sarana komunikasi melalui berbagai forum dan media menjadi amat penting untuk memperluas atau membatasi informasi.

Keempat, aspek keamanan. Konflik kepentingan dalam dekade yang akan datang, masih menunjukkan gejala akan terus berlanjut, baik antara negara maju dan negara berkembang, maupun sesama negara berkembang dan negara maju. Perkembangan keadaan yang terjadi menunjukkan kecenderungan terbentuknya kelompok-kelompok kekuatan yang saling bertentangan walaupun masing-masing

telah berupaya mencari jalan keluar, untuk mencegah terjadinya konflik militer terbuka yang membahayakan perdamaian dunia.

Di bidang militer, pengelompokan negara dalam Pakta Pertahanan relatif telah ditinggalkan, karena dianggap kurang bermanfaat, dan diganti dengan pengawasan keamanan bersama secara regional. Di samping itu negara unggul daya cenderung bertindak menekan kepada negara lemah dengan mengatasnamakan PBB. Penyebab konflik yang akan datang tampaknya belum akan berubah.

Konflik dapat terjadi karena masalah batas wilayah yang belum disepakati, antara golongan minoritas dan mayoritas, antar etnik dan agama. Atau benturan kepentingan ekonomi, perbedaan kepentingan antar golongan atau antarnegara serta perbedaan persepsi tentang HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup. Peran PBB dalam menyelesaikan berbagai konflik dunia guna untuk menciptakan stabilitas dan keamanan internasional, masih menghadapi banyak kendala, terutama konflik regional yang mengandung potensi konflik berskala besar dan strategis, yang dapat memecah belah dan merusak hubungan bilateral.

Terorisme dan kejahatan internasional akan menjadi salah satu bentuk gangguan keamanan yang perlu mendapat perhatian. Fenomena kejahatan internasional yang juga mencolok adalah perdagangan narkoba. Imigran gelap, pencurian cetak biru

proyek strategis, penyelundupan senjata api dan uang palsu. Serta kejahatan intelektual. Tidak ketinggalan bentuk-bentuk subversif yang lainnya, baik melalui jalur politik dan ekonomi, terutama melalui sosial budaya.

Kegiatan ekonomi cenderung bergeser dari samudera Atlantik ke kawasan samudera Pasifik. Di satu sisi akan terbuka peluang bagi bangsa-bangsa Asia Pasifik untuk meningkatkan kemakmuran negara masing-masing. Namun pada sisi lain perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya konflik ekonomi dan politik karena benturan kepentingan nasional. Yang berimplikasi pada keamanan negara dalam kawasan yang bersangkutan.

Di kawasan Samudera Hindia, yang merupakan lintasan penting bahan energi minyak bumi dan bahan industri strategis negara-negara industri di bagian dunia yang lain. Sebagai penghubung kegiatan ekonomi kawasan Samudera Pasifik dengan Uni Eropa, negara-negara di kawasan Samudera Hindia mempunyai peluang untuk mendukung kemajuan ekonomi sekaligus meningkatkan keamanan kawasan Samudera Pasifik yang cenderung semakin meningkat peranannya.

Masih banyak masalah yang terjadi di negara Asia Selatan, terutama konflik dalam negeri, yang menghambat pembangunan nasional seperti di Afganistan, Pakistan, India, Srilangka, Bangladesh, Myanmar, dan pada satu saat dapat mempengaruhi jalur

ekonomi di kawasan tersebut. Di sisi lain, India berambisi menguasai Samudera Hindia untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Saat ini India terus membangun kekuatan pangkalan angkatan lautnya di pantai barat dan timur khususnya di kepulauan Adaman dan Nicobar.

Di kawasan Asia Timur, perkembangan ekonomi cukup pesat dan dimotori oleh Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Negara Asia Timur yang muncul dengan pertumbuhan yang cukup pesat belakangan ini adalah Cina. Negara ini perlu mendapat perhatian, mengingat sistem ekonomi yang diterapkan mengarah kepada ekonomi pasar, di samping mengantisipasi bergabungnya Hongkong pada tahun 1997 serta "Cina Perantauan" yang banyak memegang peranan di bidang ekonomi.

Di kawasan Asia Tenggara, stabilitas keamanan cenderung terus membaik, khususnya bila campur tangan negara-negara besar semakin berkurang. Kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara semakin kuat, sejalan dengan meningkatnya aliansi ekonomi antarnegara Asia Tenggara. Kawasan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan merupakan jalur vital yang menghubungkan kepentingan ekonomi dan budaya antara negara Asean dan negara-negara lainnya. Namun masih terdapat potensi konflik perbatasan antarnegara, khususnya negara-negara yang mengklaim kepulauan Paracel dan Spratly, di mana penga-

lahan selama ini menunjukkan mereka selalu menggunakan kekuatan militer. Walaupun tampak kompak ber-satu namun masih ada masalah yang dapat mengganggu hubungan bilateral antarnegara-negara Asean, seperti kasus Spratly, Ligitan dan Sipadan, perbatasan Papua Nugini dan sebagainya.

Hakekat Ancaman terhadap Keamanan dan Perdamaian Global Menjelang Abad ke-21

Setelah kita mengamati kecenderungan perkembangan situasi global dan regional, kiranya kita dapat memperkirakan lebih tajam bagaimana hakekat ancaman sebenarnya yang bakal dihadapi dunia menjelang abad ke-21.

Ancaman pertama, berkaitan dengan kedaulatan wilayah. Keadaan saat ini dan dalam dekade mendatang, kiranya dunia masih belum dapat melepaskan prediksinya terhadap adanya konflik kedaulatan wilayah. Masalah-masalah seperti antara lain; Israel-Palestina, Irak, Kuwait, RRC dengan sebagian negara Asean, dan berbagai konflik wilayah atau perbatasan secara bilateral maupun multilateral, akan terus mewarnai polemik dunia.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya "perebutan wilayah", antara lain pesatnya perkembangan penduduk dunia yang akan melampaui 5 milyar, akibat keberhasilan dunia memperkecil angka kematian dan memperpanjang usia harapan

hidup. Konflik wilayah disebabkan pula oleh semakin menipisnya sumber daya alam yang menjadi bahan baku industri, atau karena adanya temuan kandungan sumber minyak bumi, gas alam dan mineral di kawasan tertentu di suatu batas wilayah, dan mampu mensuplai industri untuk jangka panjang.

Konflik wilayah dapat pula disebabkan oleh tidak jelasnya garis perbatasan negara dan adanya ambisi ekspansi dari suatu negara terhadap negara yang lain. Bentuk konflik ini masih terlihat di beberapa negara Asia, Afrika dan Amerika Latin atau bahkan Eropa yang hingga kini ada di antaranya yang belum tuntas upaya penyelesaiannya.

Ancaman kedua, berkaitan dengan konflik kepentingan ekonomi, yang senantiasa didukung oleh aktivitas politik dan militer. Usaha-usaha perebutan pangsa pasar atau untuk mempertahankan dan memelihara kelancaran ekspor, serta berbagai bentuk investasi, membutuhkan dukungan usaha diplomasi melalui berbagai forum dunia yang tidak mustahil disertai pula ancaman politis dan militer.

Sesungguhnya saling ketergantungan di dalam pembangunan ekonomi dunia kini sangat terasa. Tetapi di balik niat baik usaha pengelompokan ekonomi dan perdagangan seperti WTO, AFTA, NAFTA, APEC, dan lain-lain, tidak menutup kemungkinan adanya ambisi negara tertentu untuk lebih mendominasi, walaupun tidak satu pun tersurat dalam akta

kerja sama tersebut. Persaingan untuk meningkatkan perluasan perekonomian dari negara berkembang akan berhadapan dengan negara-negara yang lebih maju. Dari upaya untuk memenangkan persaingan itulah, ditempuh berbagai macam cara yang acapkali menimbulkan bentuk konflik baru.

Ancaman ketiga, adalah tidak tuntasnya upaya perlucutan senjata nuklir. Meskipun telah dicapai kemajuan yang berarti dalam upaya perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional penghancur massal, namun secara keseluruhan agenda perlucutan tersebut belum dapat diselesaikan oleh dewan keamanan PBB.

Sebagai contoh negara-negara unggul daya masih memiliki kecurigaan terhadap konsep ZOPFAN yang dianggap akan mengakibatkan berkurangnya pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara, di mana kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara (KBSN-AT) akan berdampak merugikan strategi keamanan berdasarkan *nuclear deterrence* mereka. Padahal gagasan ZOPFAN adalah *code of conduct* yang mengatur hubungan antarnegara Asia Tenggara sendiri dan antarnegara Asia Tenggara dengan negara-negara unggul daya (maju) di dunia, dalam rangka menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan ini khususnya terhadap ancaman senjata nuklir.

Pada bagian lain, usaha percobaan tentang kemampuan senjata nuklir oleh Perancis, RRC, Amerika, Rusia

dan lain-lain, terbukti masih demikian giatnya. Hal itu selain menimbulkan rasa ketakutan bagi negara-negara yang menjadi pesaingnya (*rival*), juga berdampak negatif terhadap upaya-upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.

Ancaman keempat, adalah konflik regional yang berdimensi etnis, keagamaan dan nasionalisme sempit, sebagai bentuk ancaman baru, yang memerlukan penanganan global melalui forum PBB. Peristiwa kekerasan etnis dan keagamaan yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara Afrika, Asia, Eropa dan Amerika Latin, dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk menekan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan kepentingan mereka, dengan memperluas isu HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup. Keadaan tersebut pada muaranya hanya akan menghasilkan kerja sama yang lunak atau lebih membuka peluang negara-negara maju semata.

Konflik regional yang berdimensi etnis dan keagamaan itu pula yang kini dan masa mendatang dapat menimbulkan perpecahan bangsa dan negara, di mana negara kecil baru akan muncul dan memisahkan diri dari komunitas negara induknya. Sudah barang tentu perpecahan itu tidak mustahil akan diawali dan diakhiri dengan perang.

Dalam pandangan *etnocentris* maka pengelompokan kesukuan dan ras akan membesar dan melahirkan diskriminasi rasial seperti dalam politik

apartheid di Afrika Selatan. Gejala pengelompokan ras atau suku yang didorong oleh semangat ingin merdeka dengan ide sparatisme itulah, yang kemudian dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang bersangkutan. Ancaman perpecahan etnis akan lebih besar kemungkinannya pada negara-negara yang berpenduduk heterogen.

Sorotan kita yang kelima tentang hakekat ancaman ini adalah masalah terorisme internasional. Telah berkali-kali Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jepang dan beberapa negara unggul daya lainnya dikejutkan oleh aksi terorisme, yang berhasil menimbulkan kerugian berupa korban manusia dan material yang relatif besar. Aksi terorisme selain memiliki tujuan politis, juga sebagai tindakan efektif untuk mengubah kebijaksanaan suatu pemerintahan dan menjadi sarana yang tepat untuk merubah opini dunia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang telah ikut mempengaruhi dan melengkapi perkembangan terorisme, dengan memperluas wilayah gerak para teroris hingga menjadi terorisme internasional. Terorisme merupakan bentuk, cara dan metoda untuk mencapai tujuan politik yang dianggap jauh lebih murah, efektif, aman dan cepat dibandingkan dengan perang.

Terorisme telah berkembang dari suatu kegiatan yang berukuran teknik dan taktik kriminal biasa menjadi "bentuk perang" dengan "strategi besar". Terorisme yang akan datang

tidak lagi berbicara pada tingkat taktik, karena ia telah dapat mempengaruhi para pemimpin negara, para penentu kebijaksanaan dan pengambil keputusan yang jangkauannya sangat jauh, sehingga telah menjadi strategi perjuangan bagi negara kecil yang lemah dalam rangka memperjuangkan kehendaknya. Terorisme telah memberikan alternatif baru terhadap kemungkinan keterbatasan membangun kekuatan militer konvensional yang besar.

Penggunaan terorisme dengan memperhatikan dan menerapkan asas-asas perang, dapat menjadi bentuk dan metoda untuk mencapai tujuan politik, yang berada di luar perhitungan lawan dan ditujukan terhadap sasaran yang tidak diduga. Dilihat dari pendekatan untung dan rugi, maka terorisme merupakan strategi yang masuk akal dan efektif. Dinyatakan oleh seorang pakar bahwa terorisme termasuk aksi revolusioner, berkeyakinan bahwa wilayah geografis bukanlah merupakan unsur yang paling menentukan, tetapi kancak peperangan sebenarnya berada dalam pikiran manusia.

Peranan Indonesia dalam Konteks Keamanan dan Perdamaian Dunia

Bangsa Indonesia dikenal cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal ini bermakna bahwa perdamaian tanpa menciptakan suatu kemerdekaan yang hakiki, sudah barang tentu hanya memperpanjang penderitaan

bangsa.

Berpangkal tolak dari amanat pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia bersama negara-negara yang sepeham, merintis, membentuk dan mengembangkan kekuatan baru dalam organisasi multinasional, utamanya negara-negara di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin, baik dalam kategori negara yang baru merdeka maupun yang telah berkembang untuk tujuan memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Tekanan oleh negara maju terhadap negara berkembang belum pernah berhenti. Pada saat mereka menjajah, negara-negara kolonial menggunakan kekuatan dan arogansi militernya. Saat ini pun mereka masih terus membatasi negara berkembang dengan berbagai barrier politik, ekonomi dan budayanya. Sedemikian jauh peranan negara-negara maju dan unggul daya dalam mengendalikan perkembangan dunia.

Namun demikian, Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan berbagai perhimpunan internasional yang terdiri dari kelompok negara terbelakang dan berkembang itu, saat ini dan menjelang abad ke-21 telah menampakkan kemajuan pesat. Beberapa negara yang dahulu terbelakang, kini telah mampu berswadaya dalam bidang ekonomi. Negara yang dahulu merdeka karena proses dekolonisasi, kini justru telah banyak yang menjadi negara industri baru dan telah mampu menyaingi produk-produk negara maju.

Indonesia yang turut merintis dan pernah memimpin Gerakan Non Blok, kini semakin menjadi acuan dan bahkan pemandu kemajuan bagi negara-negara berkembang lainnya.

Hal itu bukan saja menempatkan Indonesia sebagai penjuror bagi kemajuan, perdamaian dan kemakmuran, tetapi bahkan membuka mata negara-negara maju dan unggul daya saat ini, untuk tidak lagi memandang rendah, apalagi memaksakan kehendak terhadap negara-negara berkembang dalam berbagai masalah kebijaksanaan luar negerinya. Di dalam pembukaan UUD 1945 itu pula terletak landasan konstitusional bagi Indonesia dalam upayanya untuk turut menciptakan perdamaian dunia yang abadi, bebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan.

Kiranya pantas pada kesempatan ini sekilas kita simak berbagai pengalaman dan peran Indonesia dalam upaya menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Pengiriman kontingen Indonesia dalam berbagai operasi keamanan dan perdamaian selalu melalui suatu prosedur tetap berdasarkan resolusi PBB yang telah disepakati. Jenis operasi yang pernah kita laksanakan adalah operasi pengawasan polisionil, operasi pengawasan gencatan senjata, operasi demobilisasi dan pelucutan senjata, operasi perlindungan keamanan dan keselamatan serta operasi bantuan kemanusiaan.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi pasukan Indonesia un-

tuk mempertemukan dan memperoleh kata sepakat untuk gencatan senjata maupun untuk berdamai, karena kedua belah pihak senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip yang menjadi keyakinan masing-masing.

Walaupun demikian, dunia telah menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Indonesia berkat keberhasilan dan prestasinya di waktu lampau sehingga PBB akan senantiasa meminta kesediaan Indonesia untuk turut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian.

Apa yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk menentukan pilihan ikut serta menengahi atau mencari jalan damai? Secara umum, di samping dasar-dasar filosofi bahwa perdamaian dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa seperti penulis utarakan terdahulu, juga perlu melihat dan mempelajari masalah sebenarnya yang dihadapi negara-negara bersengketa tersebut, tentang kemungkinan dicarikan jalan damai. Pertimbangan lain ialah bahwa pasukan perdamaian pada dasarnya dikirim untuk mencegah timbulnya perang, bilamana persengketaan telah meluas menjadi perang terbatas, atau perang terbuka, maka pasukan PBB harus dapat menghentikan perang.

Kita selalu memperkirakan bahwa ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia dapat terjadi di berbagai negara, karena bermacam faktor penyebab yang pada saat ini dan era mendatang akan semakin kompleks. Pertentangan, perselisihan dan

persengketaan memang terjadi antar-bangsa/negara tidak selalu disebabkan oleh faktor perbedaan ideologi, atau kepentingan ekonomi, namun dapat pula karena kreasi budaya manusia itu sendiri yang kemudian berkembang pesat hingga menciptakan friksi yang kian membesar. Secara khusus pertimbangan penugasan pasukan Indonesia selalu memilih dua sikap yakni secara pasif atau aktif. Secara pasif, menunggu permintaan dari PBB dan secara aktif berdasarkan implikasi pelibatan maka Indonesia menyiapkan pasukan lebih awal yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB atau non-PBB.

Apa langkah proaktif Indonesia dalam mengantisipasi upaya pemeliharaan perdamaian di masa depan? Pada tataran diplomatik di PBB, Indonesia secara terus menerus mengikuti dan mempelajari dengan mendalam setiap perubahan kebijaksanaan PBB yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian dunia. Hal ini perlu diantisipasi, karena kecenderungan persengketaan antarnegara maupun intra negara, akan terus meningkat, yang berakibat langsung pada keperluan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian (PPP) PBB yang relatif semakin besar.

Dewasa ini peranan DK-PBB memang dalam posisi sulit. Selain dicap sebagai perpanjangan tangan negara unggul daya, secara faktual PBB juga relatif kurang berdaya. Tatkala konflik Bosnia-Herzegovina dan Serbia terja-

di, banyak resolusi DK-PBB yang dilanggar oleh pihak-pihak yang bersengketa. Bahkan banyak korban terjadi di tengah kehadiran pasukan PBB, dan tanpa mampu berbuat banyak. Misi diplomatik Indonesia selain menawarkan diri dan bersedia menjadi penengah atau fasilitator perdamaian, juga secara aktif mendukung dan menegakkan kewibawaan DK-PBB, dengan mengirim Konga XV dan misi kemanusiaan. Pada upaya diplomatik di PBB, walaupun Indonesia belum mampu secara optimal mengubah sikap dan pendirian negara yang bersengketa, namun sekurang-kurangnya peranan Indonesia baik sebagai pelopor GNB maupun pemelihara stabilitas kawasan ASEAN, telah banyak dirasakan manfaatnya bagi perdamaian dunia.

Satu tonggak sejarah yang tetap tercatat oleh seluruh pengamat perdamaian, adalah lahirnya Dasasila Bandung 1955, sebagai hasil dari konferensi Asia-Afrika. Suatu apresiasi yang gemilang pada saat itu untuk mewujudkan ketertiban yang dilandasi oleh kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sehingga masyarakat dunia mampu hidup berdampingan dalam upaya mewujudkan perdamaian. Dari saat itulah kemudian bermunculan negara-negara merdeka yang baru, dan terbebas dari alam penjajahan.

Banyak negara yang bersengketa tidak menghendaki kehadiran pasukan PBB, seperti pada konflik di Bosnia-Herzegovina yang lalu. Mereka

beranggapan bahwa pasukan PBB yang dikendalikan oleh negara unggul daya cenderung memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Indonesia dalam hal ini bersikap netral sesuai dengan cita-cita PBB yang di-canangkan sejak 1945.

Pada tataran dua pihak negara yang bersengketa, Indonesia juga telah memainkan peranan penting sebagai mediator. Pada umumnya negara-negara yang bersengketa memiliki jurang perbedaan yang dalam, sehingga sulit dipertemukan karena masing-masing pihak saling bertahan dalam "kebenaran" yang diyakini. Kondisi kedua pihak semakin enggan bertemu karena bila maju akan menerima resiko dan bila mundur akan merasa malu. Dalam situasi demikian itu mulai diperlukan posisi madya (pelera sengketa) untuk bertindak sebagai mediator yang tidak memihak.

Indonesia telah beberapa kali mengambil inisiatif menjadi penengah selaku pelera sengketa bagi negara-negara tertentu yang sedang bersengketa. Peranan para mediator sebagai pelera sengketa memang penuh resiko. Untuk mencairkan situasi yang beku antara pihak-pihak yang bersengketa menuntut sikap mediator agar selalu berjalan seimbang, hingga membentuk kompromi-kompromi kecil dan membuahkan janji kesepakatan, walaupun pihak-pihak yang bersengketa belum dapat dipertemukan secara langsung.

Kewibawaan seorang mediator (penengah) harus senantiasa dijaga,

agar dapat mengajak pihak-pihak bersengketa menuju meja perundingan. Kehati-hatian mediator mencegah agar jangan sampai ada pihak-pihak yang bertabrakan atau dipermalukan, maka perlu dilakukan secara koordinatif dengan pihak-pihak penyokong perdamaian di luar negara yang bersengketa tersebut atau kepada mitra dialog.

Peranan inilah yang sudah beberapa kali dilakukan Indonesia, untuk menjembatani masalah antarnegara bersengketa termasuk perpecahan dalam negeri tertentu, yang berhasil membawa pihak-pihak yang bersengketa menuju ke meja perundingan dan melahirkan perdamaian.

Prinsip Indonesia bertolak dari pasal 2 dan 3 piagam PBB yang meminta kepada semua anggota PBB menyelesaikan sengketa internasional lewat jalan damai, bahkan para negarawan selaku pribadi pun diharapkan mampu membantu melera dan mencari jalan damai.

Tugas pelera sengketa sangat mulia, tetapi juga tidak lepas dari resiko benturan antara kedua pihak yang bersengketa, karena upaya perdamaian itu tidak mungkin lepas dari resiko fisik dan non fisik.

Pada tataran kesiapan dalam negeri, pasukan ABRI sebagai komponen utama kekuatan kontingen Indonesia dalam rangka turut aktif sebagai pasukan gabungan pemelihara perdamaian PBB, akan selalu siap menghadapi segala kemungkinan terjadinya konflik antarnegara. Dengan

demikian kualitas ABRI dalam konteks tugas-tugas keamanan dan perdamaian di luar negeri terus ditingkatkan dengan pembinaan yang efektif.

Berdasarkan UU no. 20 tahun 1982 pasal 31, ABRI telah mempunyai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan operasi perdamaian, dalam rangka mewujudkan amanat pembukaan UUD-45. Dalam peranan sebagai PPP-PBB, ABRI akan memperkuat posisi tawar-menawar Indonesia di luar negeri, untuk mengangkat citra, menunjang keberhasilan diplomasi dan menjaga kewibawaan bangsa. Untuk kepentingan tersebut ABRI telah menerbitkan buku petunjuk *Koperasi Perdamaian Santhi Dharma*.

Penutup

Setelah kita membahas berbagai permasalahan keamanan dan perdamaian dunia, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat.

Pertama, bahwa perubahan situasi

dan kecenderungan dunia lebih banyak menuju ke arah ketidakpastian, di mana situasi perang dan damai akan sangat mungkin terjadi di mana pun dan kapan saja.

Ketiga, kebijaksanaan yang ditempuh ABRI dalam konteks tugas-tugas bersama angkatan bersenjata dengan negara lain, senantiasa berpedoman pada falsafah, doktrin dan petunjuk ABRI, yang terbukti telah mampu menambah keyakinan para prajurit di medan tugas.

Di daerah tugas, implementasi doktrin pembinaan teritorial, asas kemanunggalan dengan rakyat serta pendekatan-pendekatan budaya di tengah-tengah masyarakat di mana mereka bertugas, telah mampu mengoptimalkan pencapaian kondisi yang diharapkan, sehingga ABRI telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari kontingen pasukan PBB yang mendapatkan penghargaan dari masyarakat setempat.